

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Transboundary Haze yang disebabkan oleh kebakaran hutan merupakan merupakan isu lingkungan global yang kompleks dan berkelanjutan sampai saat ini. Kabut asap lintas batas yang disebabkan oleh kebakaran hutan, dipengaruhi oleh dua faktor utama. Faktor yang pertama adalah kondisi alam seperti keadaan tanah, dan fenomena El-nino yang melanda sehingga meningkatkan resiko kebakaran . Faktor kedua adalah ulah tangan manusia baik masyarakat maupun perusahaan yang didorong keinginan membuka lahan seluas mungkin sehingga mereka berlomba – lomba membuka lahan baru dengan cara pembakaran lahan hutan. Kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mencegah bencana kebakaran yaitu *Zero Burning Point* dianggap tidak efektif dan efisien, didukung juga oleh kondisi tanah gambut di area rawa sehingga tidak ada acara lain selain dibakar.

Kebakaran yang menyebabkan *Transboundary Haze* telah terjadi sejak tahun 1997 di mana tahun tersebut merupakan bencana kebakaran terparah yang pernah dialami Indonesia, selain itu polusi asap yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut sangat berdampak buruk tidak hanya dengara Indonesia tetapi juga negara lain yang secara geografis berdekatan dengan sumber titik api kebakaran, baik itu dibidang ekonomi, transportasi dan kesehatan. Diplomasi Lingkungan yang dilakukan oleh Indonesia memang menimbulkan pertanyaan terkait dengan

kesungguhannya dalam memperjuangkan isu tersebut. Dalam kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan Indonesia belum sepenuhnya memperjuangkan isu lingkungan terbukti dengan kebijakan yang dibuat seringkali tidak konsisten. Seringkali hal ini negara Indonesia menjadi sasaran kritikan dan kecaman dari negara – negara lain. Presiden SBY pada masa kepemimpinannya telah banyak melakukan kebijakan termasuk diplomasi lingkungan dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan abut asap. Kebijakan tersebut dinilai masih belum cukup dalam mengatasi kasus kebakaran yang menyebabkan kabut asap lintas batas tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi dari berbagai lembaga baik itu lembaga pemerintahan maupun non pemerintahan. Satu hal yang patut dicontoh dalam pemerintahan saat presiden SBY dalam menangani isu lingkungan kebakaran dan kabut asap ini adalah kepiawaian negara Indonesia dalam menggunakan diplomasi lingkungan dari yang semula diberi tekanan dan dapat mengatasi tekanan – tekanan tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pemerintah tidak bisa berbuat banyak dalam mengatasi masalah lingkungan. Meskipun demikian Indonesia tentunya tidak mau dicap sebagai negara yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan. Persoalan pencitraan menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk menjaga *image* agar dipandang sebagai negara yang peduli terhadap masalah lingkungan.

5.2 Saran

Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan acuan guna meneliti hal yang berkaitan dengan diplomasi lingkungan. Sehingga konsep dan fakta yang terdapat dalam penelitian ini membantu penelitian selanjutnya dalam melihat teori dan praktek diplomasi lingkungan dalam menangani isu lingkungan global. Penulis juga berharap pada penelitian berikutnya terdapat temuan baru mengenai diplomasi lingkungan Indonesia dalam mengatasi isu – isu lingkungan

yang tak terkendali. Sehingga kedepannya bisa dijadikan pelajaran dan bahan pertimbangan untuk merumuskan kepentingan Negara dan mengambil kebijakan dalam menghadapi isu – isu lingkungan global yang kompleks.

